



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VI DPR RI

#### **BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	: 10 (Sepuluh)
Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI.
Hari, Tanggal	: Kamis, 14 September 2023
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka.
Pimpinan Rapat	: Aria Bima/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan mengenai : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyesuaian RKA KL Tahun Anggaran 2024 (sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran); dan</li><li>2. Lain-lain.</li></ol>
Hadir	: 1. 23 Orang dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri BUMN RI, Bapak Erick Thohir; Beserta jajaran.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI pada pukul 10.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 14 September 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian BUMN RI Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian hasil Pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp.308.016.126.000,- (*Tiga Ratus Delapan Miliar Enam Belas Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*). Sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian BUMN RI dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 15 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.
  
2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri BUMN RI terkait alokasi Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp.18.600.000.000.000,- (*Delapan Belas Triliun Enam Ratus Miliar Rupiah*) dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap 1 dan penyelesaian Jalan Tol Ruas Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi.
  - b. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/*Indonesia Financial Group* sebesar Rp.3.560.000.000.000,- (*Tiga Triliun Lima Ratus Enam Puluh Miliar Rupiah*) dalam rangka penyelesaian penyelamatan pemegang polis Jiwasraya.
  - c. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebesar Rp. 6.000.000.000.000,- (*Enam Triliun Rupiah*) dalam rangka penguatan permodalan untuk menunjang kebutuhan modal kerja Proyek Strategis Nasional.Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman dengan masing-masing BUMN yang akan menerima alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) tersebut.
  
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri BUMN RI terkait Penyertaan Modal Negara yang berasal dari cadangan investasi Tahun Anggaran 2024 yang akan diprioritaskan kepada BUMN-BUMN sebagai berikut:
  - a. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (*Dua Triliun Rupiah*) dalam rangka pengadaan kereta.
  - b. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (*Satu Triliun Rupiah*) dalam rangka penguatan permodalan.
  - c. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar

Rp.3.000.000.000.000,- (*Tiga Triliun Rupiah*) dalam rangka pembelian kapal penumpang angkutan perintis.

- d. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (*Satu Triliun Rupiah*) dalam rangka peningkatan kapasitas produksi.
- e. PT PLN (Persero) sebesar Rp.5.860.000.000.000,- (*Lima Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Miliar Rupiah*) dalam rangka pelaksanaan program elektrifikasi desa.
- f. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID.Food sebesar Rp.832.000.000.000,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah*) dalam rangka pembangunan *cold storage* dan modal kerja.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman dengan masing-masing BUMN yang akan menerima alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari cadangan investasi Tahun Anggaran 2024 tersebut.

- 4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.46 WIB.

**MENTERI BUMN RI**

Ttd.

**ERICK THOHIR**

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**ARIA BIMA  
A-189**